

HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL



Oleh
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum.

**Materi kuliah Hukum Lingkungan Pada
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

BEBERAPA PENGERTIAN

PENGERTIAN

- Pengertian yang tegas tentang Hukum Lingkungan tidak mudah
- Ruang Lingkup Hukum Lingkungan sangat luas dan banyak coraknya

ISTILAH HUKUM LINGKUNGAN

Milieurecht (Belanda)

Environmental Law (Inggris)

Umweltrecht (Jerman)

Droit de L'environnement (Prancis)

Hukum Alam Seputar (Malaysia)

PENDAPAT SARJANA

- *Munadjat Danusaputro* :
 - Hukum Lingkungan ialah hukum yg mengatur tatanan lingkungan (hidup).
 - Maksud dan tujuan pokoknya utk memelihara dan melindungi LH.
- ♠ Hukum Lingkungan dibagi dua :
 1. Hukum Lingkungan *modern*
 2. Hukum Lingkungan *klasik*

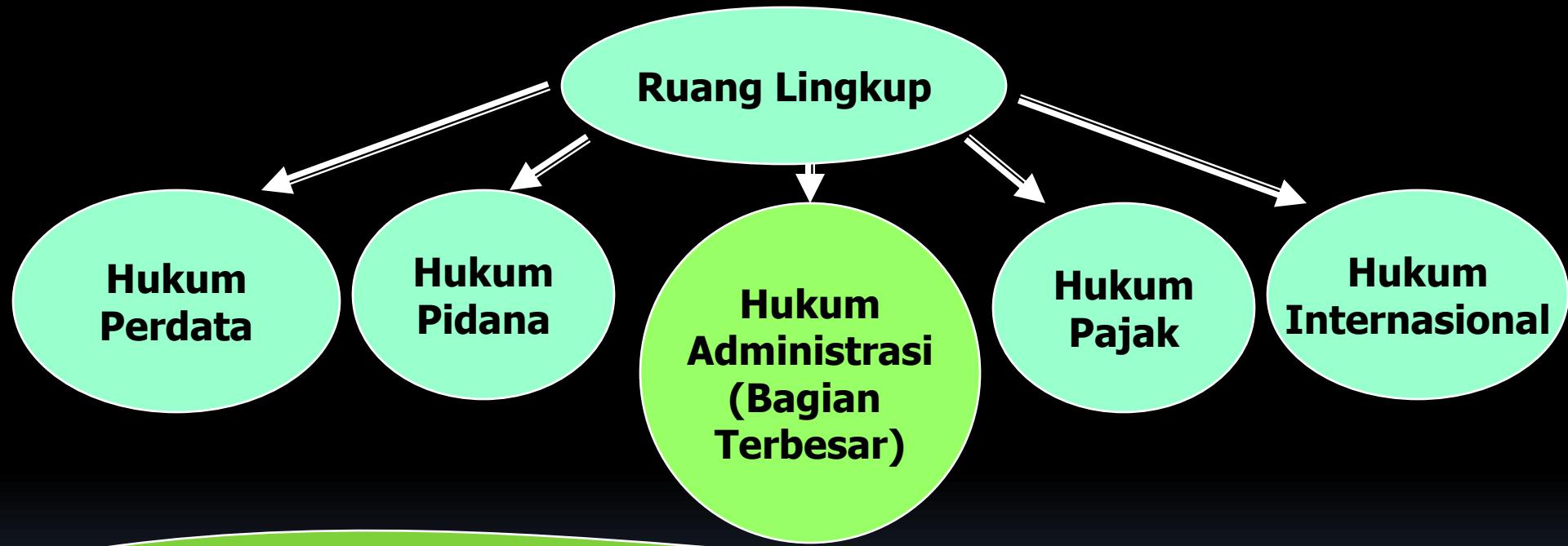
BEBERAPA PENGERTIAN.....

- **Ciri Hukum Lingkungan Modern**
 - * **Environmental oriented law**
 - * **Sifat utuh menyeluruh**
 - * **Ada sejak Stockholm Dec & UULH-82**
- **Hukum Lingkungan Klasik**
 - * **Use oriented law**
 - * **Sifat sektoral, kaku**
 - * **Tujuan : Penggunaan dan eksploitasi SDL semaksimal mungkin dan waktu yang singkat**
- ***Drupsteen***

Hukum Lingkungan = Instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.
Hukum Lingkungan berkaitan dg lingkungan alam dalam arti luas
- ***Siti Sundari Rangkuti***

Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai yg sedang berlaku dan yg diharapkan diberlaku-kan yg mengatur tatanan lingkungan hidup

RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN



Sepanjang bidang hukum tersebut memuat ketentuan yg berkaitan dengan lingkungan

PERATURAN SEBELUM UULH/UUPLH (1)

HInder Ordonnantie (S. 1926/226)

Menetapkan larangan mendirikan tempat usaha tanpa izin Tempat usaha yg menimbulkan bahaya, kerusakan, dan atau gangguan (Secara limitatif ada 20 macam)

Kelemahan HO

- **Masih ditulis dalam Bahasa Belanda**
- **Tidak ditetapkan jangka waktu berlakunya izin**
- **Tidak jelas batasan bahaya, kerusakan, gangguan**
- **Ketentuan pidana sangat ringan**
- **HO semacam hukum tetangga (200 m dari tempat usaha dan dlm batas Dati II)**
- **HO bersifat individual**

Peraturan Sebelum UULH/UUPLH (2)

Gevaarlijke Stoffen Ord. (GSO, S. 1949/377)

Mengatur larangan impor, pembuatan, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pemakaian atau penggunaan bahan beracun yg membahayakan kesehatan manusia, kecuali dg izin Menkes.

▣ Pelanggaran dikenakan sanksi :

- Pidana kurungan 3 bulan**
- Barang/benda dapat disita**

▣ Kelemahan GSO :

- Sanksi sangat rendah**
- GSO masih memungkinkan impor B3 (Dalam UUPLH dilarang)**

Peraturan Sebelum UULH/UUPLH (3)

■ Peraturan terkait dengan B3 selain GSO

- ✓ **PP No. 7/1973 = Pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida**
- ✓ **PP No. 12/1975 = Izin pemakaian zat radio aktif dan sumber radiasi lainnya**
- ✓ **PP No. 13/1975 = Pengangkutan zat radio aktif**
- ✓ **PP No. 85/1999 = Pengelolaan limbah B3**

■ Izin yang berkaitan dengan pengelolaan B3

- ✓ **Izin penggunaan B3 (Menkes : Ps. 1 GSO)**
- ✓ **Izin pestisida (Menteri Pertanian : PP No. 7/1973)**
- ✓ **Izin pemakaian zat radio aktif (BATAN : PP No. 12/1975)**
- ✓ **Izin pengangkutan limbah B3 (Menhub)**
- ✓ **Izin pengumpulan, pengolahan, penimbunan B3 (Bapedal)**
- ✓ **Izin lokasi pengolahan limbah B3 (Pertanahan)**

Perundang-undangan Lingkungan Nasional

Kelompok Lingkungan Hidup:

1. UU No. 4 Tahun 1982 (UULH-1982)
2. UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH-1997)
3. UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009)

Berbagai Peraturan Sektoral:

1. UU Kehutanan
2. UU Sumber Daya Air
3. UU Perikanan
4. UU Minerba, dll



Peraturan
Pelaksan
aannya

Perundang-undangan Lingkungan Nasional

▣ Latar Belakang UULH-1982

- ✓ Peraturan sebelumnya belum mengatur lingkungan secara komprehensif
- ✓ Bersifat sektoral dan ketinggalan zaman

▣ UULH-1982 diganti dengan UU No. 23/1997 (UUPPLH-1997) karena:

Ada kelemahan substansi (sanksi adm lemah, mekanisme penyelesaian sengketa belum jelas, delik LH hanya materiel)

□ UUPPLH-1997 diganti kembali dengan UU No. 32/2009 (UUPPLH-2009)

- ✓ Perkembangan HAM LH (Internasional dan Nasional)
- ✓ Penyesuaian dengan Otonomi Daerah
- ✓ Prinsip pembangunan berkelanjutan, dll

ASAS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. tanggung jawab negara;**
- b. kelestarian dan keberlanjutan;**
- c. keserasian dan keseimbangan;**
- d. keterpaduan;**
- e. manfaat;**
- f. kehati-hatian;**
- g. keadilan;**
- h. ekoregion;**
- i. keanekaragaman hayati;**
- j. pencemar membayar;**
- k. partisipatif;**
- l. kearifan lokal;**
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan**
- n. otonomi daerah.**

TUJUAN PPLH

- a. melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan LH;**
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;**
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;**
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan LH;**
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;**
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas LH sbg bagian dari HAM;**
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;**
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan**
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.**

RUANG LINGKUP PPLH

- a. perencanaan;**
- b. pemanfaatan;**
- c. pengendalian;**
- d. pemeliharaan;**
- e. pengawasan; dan**
- f. penegakan hukum.**